



PANDUAN PENGAWASAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

**KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

KATA PENGANTAR

Syukur kami sampaikan kepada Allah Swt. atas perkenan-Nya penyusunan Panduan Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 ini dapat diselesaikan.

Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi ini meliputi penggunaan aplikasi yang dipergunakan dalam kegiatan tugas dan fungsi dalam Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Aplikasi tersebut antara lain aplikasi e-kehadiran pegawai, e-SKP kemdikbud, Sistem Informasi Naskah Dinas Elektronik (SINDE), maupun aplikasi e-SAKIP (SPASIKITA).

Panduan ini disusun berdasarkan hasil diskusi oleh Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Panduan pengawasan dan evaluasi ini diharapkan dapat memandu pihak-pihak yang terkait dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) agar dapat berjalan lancar.

Kami sangat menghargai dan menyampaikan penghargaan yang tinggi atas kerja sama dan peran aktif semua pihak dalam mendukung kelancaran kegiatan ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang	1
B. Tujuan.....	3
C. Hasil	3
D. Ruang Lingkup	3
BAB II PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI	4
A. Waktu pelaksanaan.....	4
B. Sasaran Kegiatan.....	4
C. Petugas dan Sasaran Pemantauan.....	5
D. Jadwal Kegiatan Pemantauan.....	5
E. Skenario Kegiatan.....	6
BAB III INSTRUMEN PEMANTAUAN.....	7
BAB IV PENUTUP	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia tak bisa lepas dari adanya dunia digital. Demikian juga dinamika pemerintahan harus mengikuti tren perubahan zaman. Pemerintahan masa depan adalah pemerintahan yang harus adaptif, berbasis bukti, dan berorientasi pada masyarakat. Dinamika dan tantangan pemerintahan masa depan harus berbasis teknologi. Pandemi Covid-19 mendorong perubahan situasi dan peradaban, mengakibatkan perkembangan teknologi menjadi tulang punggung kemajuan peradaban. Oleh karena itu, lembaga pemerintahan harus mengutamakan peningkatan layanan digital dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Demikian juga Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu lembaga pemerintah dalam naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi harus mengedepankan peran teknologi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Selain itu sebagai lembaga pemerintah, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat juga mempunyai komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini salah satu tujuannya adalah program pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dan Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM). Dalam pembangunan ZI-WBK Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat mengacu pada enam area perubahan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Keenam program area perubahan di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu 1) Manajemen Perubahan; 2) Penataan Tata Laksana; 3) Penataan Sistem Manajemen SDM; 4) Penguatan Pengawasan; 5) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Program pembangunan ZI-WBK mengutamakan pada peningkatan layanan prima untuk semua pemangku kepentingan di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam melaksanakan program ZI-WBK, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan tiga strategi dasar meliputi integrasi proses, berbagi

sumber daya, dan berbasis teknologi informasi. Berkaitan dengan strategi dasar tersebut, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan implementasi penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada bidang-bidang tertentu. Misalnya, dalam bidang persuratan ada aplikasi Sistem Informasi Naskah Dinas Elektronik (SINDE), bidang kepegawaian terdapat aplikasi e-SKP dan e-Kehadiran, dalam bidang kinerja instansi terdapat aplikasi e-SAKIP (SPASIKITA), dan lain-lain. Implementasi penggunaan aplikasi ini sebagai bagian dari tindak lanjut implementasi unit kerja di atasnya, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

B. Tujuan

Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada unit kerja di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini bertujuan untuk

1. mengetahui perkembangan penggunaan aplikasi elektronik pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. mengetahui tingkat kemudahan atau kesulitan aplikasi elektronik pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
3. memberikan masukan kepada pimpinan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat mengenai perkembangan pelaksanaan penggunaan aplikasi elektronik pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

C. Hasil yang diharapkan

Hasil yang diharapkan pada panduan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ini adalah untuk menjadikan panduan ini sebagai acuan pada tim yang dibentuk dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan pengawasan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat yang difokuskan pada implementasi penggunaan aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi maupun oleh lembaga atau lintas kementerian terhadap kemudahan penggunaannya.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN EVALUASI

A. Waktu pelaksanaan

Kegiatan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan aplikasi di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan setiap triwulan dalam tahun 2022.

B. Sasaran Kegiatan

Untuk kelancaran pelaksanaan dan sasaran pengawasan dan evaluasi penggunaan aplikasi ini dibutuhkan hal-hal sebagai berikut:

NO.	SASARAN
1.	Aplikasi Persuratan
	▪ Pengawasan dan evaluasi penggunaan aplikasi
	▪ Respons pengguna aplikasi
2.	Aplikasi Sasaran Kinerja Pegawai Elektronik (e-SKP)
	▪ Pengawasan dan evaluasi penggunaan aplikasi
	▪ Respons pengguna aplikasi
3.	Aplikasi Kehadiran Pegawai (e-kehadiran)
	▪ Pengawasan dan evaluasi penggunaan aplikasi
	▪ Respons pengguna aplikasi
	▪ Sistem Informasi Kepegawaian
4.	Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg)
	▪ Pengawasan dan evaluasi penggunaan aplikasi
	▪ Respons pengguna aplikasi

C. Petugas dan Sasaran

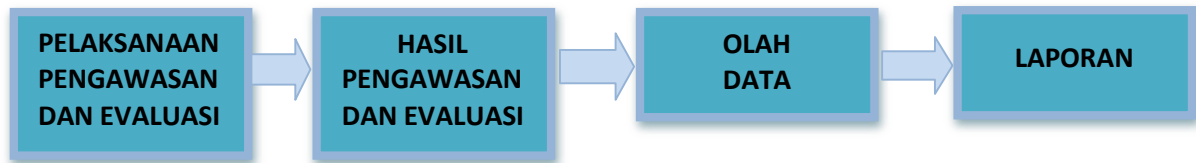
Petugas pengawasan dan evaluasi penggunaan aplikasi adalah staf dari Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan staf Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ditugasi untuk melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan aplikasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi. Tim yang dibentuk mendapatkan surat tugas dari Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sasaran pemantauan penggunaan aplikasi adalah semua staf Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terlibat dalam kegiatan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi.

D. Jadwal Kegiatan Pemantauan

No.	Aspek yang dipantau / diperiksa	Triwulan ke-			
		1	2	3	4
1.	Ketepatan penggunaan aplikasi SPBE	√	√	√	√
2.	Bagan alur penerapan SPBE	√	√	√	√
3.	Ketepatan waktu penggunaan aplikasi SPBE	√	√	√	√
4.	Keharusan penerapan aplikasi SPBE	√	√	√	√
5.	Kesesuaian bagan alur penggunaan aplikasi SPBE dengan tugas fungsi pegawai	√	√	√	√
6.	Kesesuaian penggunaan aplikasi SPBE dengan tupoksi pegawai	√	√	√	√
7.	Maklumat pernyataan kesanggupan pegawai dalam menggunakan aplikasi SPBE	√	√	√	√
8.	Kecepatan penanganan perbaikan aplikasi SPBE	√	√	√	√

E. Skenario Kegiatan

Strategi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan evaluasi penggunaan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi diatur sebagai berikut:



BAB III

INSTRUMEN PENGAWASAN DAN EVALUASI

Instrumen penilaian pengawasan dan evaluasi penggunaan aplikasi terhadap delapan area adalah sebagai berikut:

NO.	ASPEK YANG DIPANTAU / DIPERIKSA	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan penggunaan aplikasi SPBE				
2	Bagan alur penerapan SPBE				
3	Ketepatan waktu penggunaan aplikasi SPBE				
4	Keharusan penerapan aplikasi SPBE				
5	Kesesuaian bagan alur penggunaan aplikasi SPBE dengan tugas fungsi pegawai				
6	Kesesuaian penggunaan aplikasi SPBE dengan tupoksi pegawai				
7	Maklumat pernyataan kesanggupan pegawai dalam menggunakan aplikasi SPBE				
8	Kecepatan penanganan perbaikan aplikasi SPBE				

Menggunakan Skor :

4 = Sangat Baik;

3 = Cukup Baik;

2 = Kurang Baik;

1 = Tidak Baik

Diperoleh rata-rata nilai ... atau setara dengan ... pada skala 100 dalam pelaksanaan program Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2022 di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

BAB IV

PENUTUP

Panduan ini merupakan acuan umum yang mengikat dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penggunaan aplikasi elektronik dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi pada unit kerja Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tingkat keberhasilan kegiatan ini sangat bergantung pada penilaian yang direkap pada daftar nilai dalam hasil pemantauan.

Apresiasi dan ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini.

